

Judul : **Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Ditinjau Dari Aspek sosial Ekonomi Dan Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan**
Tahun : **2010**
Penulis : **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau**
Kategori : **Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan yang belum sepenuhnya mampu memberikan distribusi manfaat yang seimbang antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sekitar hutan. Eksploitasi sumber daya hutan, perkembangan HPH dan HTI, konversi kawasan menjadi perkebunan, ketidakjelasan penguasaan lahan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan mendasarnya adalah ketidakseimbangan distribusi manfaat sumber daya hutan yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Penelitian bertujuan mengetahui distribusi pemilikan dan penguasaan lahan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat; mengidentifikasi serta mengevaluasi pola pengelolaan hutan dan lahan dalam pemberdayaan masyarakat; serta menyusun model pengelolaan hutan yang sinergis dan adaptif. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penyusunan skenario kebijakan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih seimbang, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian dilaksanakan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir, khususnya pada kecamatan dan desa di sekitar kawasan hutan produksi yang dikelola pemegang izin HPH dan HTI. Kabupaten Siak dipilih untuk merepresentasikan pengelolaan hutan tanaman, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir merepresentasikan pengelolaan hutan alam. Analisis mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memperhatikan pendapatan dan kesempatan kerja, penyelesaian konflik, transfer pengetahuan dan teknologi, produktivitas lahan, serta dampak pengelolaan terhadap sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur pengelolaan sumber daya hutan. Di Kabupaten Rokan Hilir, misalnya, hasil kompilasi data menunjukkan pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah sekitar 20,03%, swasta 76,83%, dan masyarakat hanya 3,14%. Kondisi tersebut memperlihatkan dominasi pihak swasta dalam hak pengelolaan kawasan hutan dan menunjukkan bahwa pola pengelolaan hutan pada saat penelitian masih kuat berorientasi pada korporasi.

Kajian juga menemukan persoalan ketidaksinkronan tata ruang dan penggunaan kawasan. Di Rokan Hilir terdapat perbedaan luas hutan produksi berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Dokumen menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang sehingga diperlukan

paduserasi peta TGHK dan RTRWK sebagai dasar pembangunan yang lebih jelas. Selain itu, kondisi riil sebagian areal yang secara administratif belum dimanfaatkan juga belum diketahui secara pasti akibat aktivitas perambahan kawasan hutan untuk perkebunan.

Dari sisi pemberdayaan, penelitian menempatkan akses dan kapasitas para aktor sebagai faktor penting dalam menentukan bentuk pengelolaan hutan yang sesuai. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak secara otomatis menjadi pilihan terbaik untuk seluruh kondisi. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas masyarakat, pemerintah, dan swasta serta karakteristik sumber daya yang dikelola. Karena itu, diperlukan pola pengelolaan yang mampu mengkombinasikan keunggulan masing-masing aktor dan menempatkan masyarakat sebagai bagian nyata dalam pengelolaan serta penerimaan manfaat sumber daya hutan.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kepastian hak atas tanah, konflik penggunaan lahan, dan lemahnya transfer kapasitas pengelolaan kepada masyarakat. Dokumen mencatat bahwa keterbatasan bukti kepemilikan lahan masyarakat dapat meningkatkan kerentanan terhadap konflik, termasuk klaim tumpang tindih antara lahan masyarakat dan konsesi. Dalam pola kemitraan, pemberdayaan juga berisiko tidak optimal apabila masyarakat hanya dilibatkan pada aspek organisasi dan operasional, sementara proses perencanaan dan pengendalian tetap didominasi korporasi.

Secara keseluruhan, penelitian mengarah pada kebutuhan model tata kelola hutan dan lahan yang sinergis, adaptif, dan kolaboratif, dengan mempertimbangkan potensi biofisik kawasan, karakteristik para pemangku kepentingan, aspirasi sosial masyarakat, aspek ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Model alternatif tersebut diarahkan untuk memperbaiki keseimbangan akses dan manfaat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga pengelolaan hutan tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga mampu mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya hutan.